

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CABANG ISKANDAR MUDA
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

**NURLY MANURUNG
NPM : 068320077**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Hipotesis	3
D. Luas dan Tujuan Penelitian	4
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	5
F. Metode Analisis	6

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit	7
B. Analisis Pemberian Kredit	17
C. Evaluasi Laporan Keuangan	20
D. Pengawasan Pemberian Kredit	27

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

BAB	III : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	
	CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN	
	A. Gambaran Umum Perusahaan.....	31
	B. Jenis Kredit yang Diberikan	42
	C. Analisis Pemberian Kredit	47
	D. Evaluasi Laporan Keuangan	50
	E. Pengawasan Pemberian Kredit.....	61
BAB	IV : ANALISIS DAN EVALUASI	65
BAB	V : KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan bentuk maupun bidang usaha perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan, agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal, yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan perusahaan/badan usaha serta kelanjutannya pada masa yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini, bank juga berfungsi sebagai mobilisator penghimpun dana masyarakat dan mengalokasikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana sebagai modal tambahan dalam kegiatan usaha.

Bank tidak hanya menyalurkan dana yang dimilikinya dan memberi jasa perbankan yang sesuai dengan fungsi utamanya, tetapi juga menggerakkan dana masyarakat untuk kepentingan perekonomian. Di dalam melaksanakan fungsinya,

dana masyarakat yang telah dihimpun disalurkan melalui perusahaan atau badan usaha yang memerlukannya. Bank harus mengalokasikan dana tersebut secara terencana, terpadu dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tugasnya, bank pemerintah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, yaitu mampu memuaskan keinginan dari pasar serta sebaliknya dapat menarik manfaat dari perkembangan dan kemakmuran bank yang bersangkutan.

Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan kredit yang diberikan kepada masyarakat akan mempengaruhi kondisi kesehatan perbankan. Semakin tinggi kredit macet, maka *Non Performing Loan* (NPL) suatu bank juga akan tinggi begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya NPL perbankan ini sangat dipengaruhi oleh proses pemberian kredit tersebut.

Mengingat pentingnya kredit bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha dan keberhasilan suatu bank sangat tergantung pada usaha perkreditan yang membutuhkan pengelolaan/pengaturan atau manajemen yang terpadu dalam pemberian kredit. Dengan adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, kredit yang diberikan dapat kembali lancar sesuai keuntungan yang diharapkan bank.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pemberian kredit berikut analisis serta penilaiannya dan menuangkannya

dalam tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan, maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proses pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia?

C. Hipotesis

“Hipotesis merupakan pernyataan tentang adanya hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan yang bersifat sementara dan hal ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis yang lain yang lebih tepat dengan tujuan untuk memberikan arah kepada penelitian dan membatasi variabel yang dapat digambarkan.”¹

¹ Koentjaraningrat, **Metode Riset**, Edisi Satu, Cetakan Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 28.

Hipotesis yang disebutkan juga disebut sebagai anggapan atau dugaan kritis tentang kemungkinan adanya data atau jawaban yang diperoleh untuk menegakkan hipotesis tersebut.

Dari perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Proses pemberian kredit yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kredit.

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Jika pelaksanaan pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan pedoman perkreditan yang baik, maka pelaksanaan pemberian kredit akan tepat sasaran. Karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya maka penulis membatasi penelitian hanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberian kredit

3. Untuk dapat memberikan saran bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan terutama dalam mengatasi masalah pelaksanaan pemberian kredit.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan berdasarkan kepustakaan seperti *text book*, majalah ilmiah, buletin dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dilakukan atau sesuai dengan objek penelitian yang sifatnya teoritis sehingga diperoleh data sekunder.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data atau keterangan dimana penulis langsung mengadakan penelitian pada perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh adalah data primer.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui:

- a. Pengamatan (*observation*), yaitu melakukan peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti dan membuat catatan-catatan yang diperlukan untuk mendapat gambaran sepintas.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang dalam instansi untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan.

- c. Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*), yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diisi jawabannya oleh responden yang berwenang, guna memperlancar proses wawancara.

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dimulai dengan pengumpulan data, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis kemudian menafsirkan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang diteliti.
2. Metode analisis deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari rumusan-rumusan berupa kesimpulan yang logis dan dapat diterima umum sebagai suatu kebenaran, menuju kesimpulan khusus berupa fakta yang menjadi objek pengamatan, untuk akhirnya membandingkan antara kedua kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas, baik mengenai penyesuaian maupun penyimpangan yang ada di antara keduanya.

Dari kedua hasil analisis di atas, penulis akan mengambil kesimpulan selanjutnya menyusun saran sebagai jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

1. Pengertian kredit

Banyak pendapat dari para ahli yang mendefinisikan maupun memberikan pengertian tentang kredit, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan.”²

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”³

² Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Edisi Kedua, Jakarta, 2004, hal. 99.

³ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, 2003, hal. 44.

“Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.”⁴

Kredit menurut pasal 1 huruf k UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang.
3. Resiko, yaitu resiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari resiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
4. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.”⁵

⁴ *Ibid*, hal. 5.

⁵ *Ibid*, hal. 7.

2. Jenis jenis kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari “kriteria lembaga pemberi kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.”⁶

1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:
 - a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dan bank kepada individu untuk membiayai pembelian yang berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diemban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan tersebut.
 - c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia

⁶ Muhammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 5.

memberikan langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif baik kredit investasi atau kredit eksploitasi.
 - 1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.
 - 2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an.

- c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang dimiliki subsidi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari:
- a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
- b. Kredit impor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor.
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, asset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari :
- a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
- Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (kredit usaha kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah

kegiatan usaha yang assetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 250 juta. Misi kredit Usaha Kecil (KUK) adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

- b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang assetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.
 - c. Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang assetnya lebih besar dari pada pengusaha menengah.
5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:
- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.
6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:
- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa

direalisasikan, karena Undang-Undang Perbankan 1992 tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan.

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur dengan mendapat jaminan, dimana debitur akan melunasi hutangnya melalui jaminan jika kredit dimaksud tidak berhasil dikelola dengan baik. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

7. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, di susun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab dari mulai proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.⁷

Dengan demikian pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga keuangan, maka:

- a. Apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena:

⁷ Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 45

1. Keterbatasan dana bank.

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur terutama *corporate*, seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar.

2. Penyebaran resiko

Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Dengan demikian, resiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh pihak bank pemberi kredit sindikasi.

3. Pembatasan peraturan perundang-undangan

Bahwa bank pemberi kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan akan berpengaruh terhadap *loan to deposit ratio* dan *capital adequacy ratio*. Bahkan mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

- b. Apabila dilihat dan subyeknya, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Pihak debitur (*borrower*)

Pihak debitur ini adalah sebagai yang menerima pinjaman atau kredit yang ada pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas).

2. Pihak para kreditur (*lenders*)

Pihak para kreditur ini sering juga disebut *the lenders* atau *participant*, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

3. Pihak *lead manager*

Pihak *lead manager* adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka *lead manager* mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya *lead manager* akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai manager, manager dan co-manager yang dalam prakteknya juga bertindak sebagai *lender*.

4. Pihak Agent Bank

Pihak agent bank ini mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (*lenders*) pihak Agent Bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (*lenders*), yang bertanggung-jawab secara operasional dalam mengelola pinjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada debitur dengan perkataan lain pihak Agent

ini hanya mengatur administrasi operasional saja. Dalam praktek perbankan yang menduduki posisi Agent Bank ini pada umumnya adalah Bank yang menjadi *lead manager*. Kemudian dalam prakteknya, Lead Manager, Manager, Co-Manager dan Agent mendapat imbalan berupa fee yang dibebankan pada debitur.

Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kredit sindikasi selain perjanjian kredit antara kreditur dengan debiturnya terdapat perjanjian sindikasi yang ditandatangani antara dan oleh para kreditur (*lenders*). Penting diketahui oleh *legal officer* bahwa analisis dari sisi *legal aspect* kredit sindikasi tidak berbeda dengan kredit biasa, walaupun kredit sindikasi merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan cara pemberian kredit biasa.

Faktor-faktor yang membedakan antara kredit biasa dengan kredit sindikasi antara lain adalah:

1. Faktor perjanjian kredit (*loan agreement*)

Dalam perjanjian kredit ini terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan para kreditur (bank-bank dan participant), debitur dan agent bank.

2. Faktor *lead manager bank*

Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai *lead manager* yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah

pinjaman yang diberikan oleh *participant* lainnya, mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan sebagai *lead manager*.

3. Faktor suku bunga (*interest rate*)

Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negoisasi tersendiri terhadap tingkat suku bunga (*interest rate*) yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. *Interest rate* tersebut dapat berupa *fixed rate* dan dapat pula berbentuk *floating rate*.

4. Faktor *market*

Dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah *corporate* (perseroan terbatas) untuk kredit investasi dan modal kerja, *manufacturing* dan *trading*.

5. Faktor jangka waktu.

Kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (*long term*) atau menengah (*medium term*), yaitu dari 3 sampai 15 tahun.

B. Analisis Pemberian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Telah dikemukakan bahwa pemberian kredit mengandung suatu resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi maka

permohonan kredit harus dinilai bank atas dasar syarat-syarat bank teknis yang dikenal dengan prinsip 5 C. Prinsip tersebut meliputi:

- 1) *Character*, yaitu suatu penilaian tentang sifat-sifat pribadi, watak, kejujuran dari pemimpin perusahaan calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk dan bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah mengenal dari dekat, mengumpulkan informasi dari rekan-rekannya serta saingannya mengenai reputasi, kebiasaan dan lain-lain.
- 2) *Capacity*, yaitu hal yang menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan serta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksinya, angka penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi perusahaan saat ini, data finansial di waktu-waktu lain yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon debitur untuk melaksanakan rencana kerja di waktu yang akan datang, dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut.
- 3) *Capital*, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan komposisi *tangible net work*. Bank harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu, bank harus menganalisis neraca dan mengadakan analisis rasio untuk mengetahui posisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon debitur.

- 4) *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh perusahaan calon debitur atas jaminan kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai pengamanan kredit apabila usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usaha yang normal.
- 5) *Condition*, yaitu kondisi perusahaan calon debitur di masa mendatang. Karena itu lazim disebut *condition of economic*. Berkenaan dengan itu, situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu masa maupun untuk suatu kurun tertentu yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dan perusahaan calon debitur. Untuk itu bank harus memperhatikan:
- a. *Trend* ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur,
 - b. Prospek usaha calon debitur, perbandingannya dengan sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya,
 - c. Prospek pemasaran dari usaha calon debitur,
 - d. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan calon debitur termasuk di dalamnya.

Selain memperhatikan faktor-faktor 5 C tersebut di atas, para pejabat kredit bank harus pula memperhatikan pedoman 3 R dalam penilaian penggunaan kreditnya yaitu:

1. *Return*, adalah penggunaan kredit tersebut menghasilkan *return* atau hasil pendapatan yang cukup untuk menutupi biayanya.
2. *Repayment Capacity*, yaitu kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya (*repayment capacity*).
3. *Risk Bearing ability*, apakah perusahaan pemohon kredit mempunyai kemampuan untuk menampung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang bersangkutan dengan penggunaan kredit tersebut.

C. Evaluasi Laporan Keuangan

Pemberian kredit akan dipengaruhi oleh banyak pertimbangan yang ingin dirangkum dalam rangka pengambilan keputusan kredit. Hal ini tergantung pada jenis dan besarnya usaha, tingkat resiko, jenis dan besarnya kredit serta berbagai faktor relevan lainnya. Titik berat evaluasi adalah aspek keuangan berdasarkan laporan keuangan, neraca dan laba / rugi pemohon kredit. Untuk mengevaluasi neraca suatu perusahaan dikenal beberapa cara evaluasi yang mempunyai kegunaan tersendiri yaitu:

1. Evaluasi horizontal, bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam masing-masing akun neraca dari suatu periode ke periode yang lain. Perubahan tersebut dihitung secara absolut dalam Rupiah dan relatif dalam prosentasi. Perubahan yang kecil baik secara absolut maupun secara relatif dapat diabaikan. Seharusnya perubahan-perubahan besar yang terjadi

baik secara absolut maupun secara relatif harus dievaluasi secara teliti untuk mengetahui faktor penyebabnya.

2. Evaluasi vertikal adalah bertujuan untuk mengetahui perbandingan secara persentasi dari masing-masing akun dalam neraca dengan jumlah pos tertentu dalam neraca, misalnya prosentasi masing-masing akun atas seluruh aktiva maupun pasiva neraca.
3. Evaluasi akun neraca bertujuan untuk melengkapi evaluasi horizontal dan vertikal yang hanya dapat mengetahui perubahan yang turun ataupun naik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi neraca (tiap akun neraca) adalah sebagai berikut:
 - a. Kas dan bank
Berapa jumlah uang kas dan saldo bank yang sebaiknya tersedia dalam perusahaan. Berapa persen sebaiknya peranan dalam jumlah aktiva, bagaimana perkembangan saldo kas dan saldo bank tersebut? Tergantung dari jenis dan keadaan usahanya. Jumlah saldo kas dan bank yang terlalu besar berarti terdapat dana yang tidak produktif. Sedangkan jumlah yang terlalu kecil akan membahayakan likuiditasnya.
 - b. Piutang dagang
Berapa besar peranannya dalam aktiva dan bagaimana perkembangannya. bagaimana hubungan antara jangka waktu perputaran piutang dengan syarat pembayaran pada waktu diadakan penjualan kredit.
 - c. Persediaan barang
Penilaian persediaan barang harus dilakukan secara konsisten.
 - d. Aktiva lancar lainnya.
Analisis pada proses ini terbatas pada apakah benar-benar ada dan mudah dicairkan.
 - e. Inventaris kantor, alat pengangkutan dan mesin
Analisis akun ini terbatas pada apakah peralatan tersebut milik perusahaan, bagaimana diperolehnya dan bagaimana metode penghapusan dan lain- lain.

- f. Gedung dan tanah
Analisis akun ini terbatas pada apakah bukti-bukti kepemilikannya lengkap dan sah, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana metode penghapusannya.
- g. Kredit bank jangka pendek
Analisis pos ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan hutang tersebut dihadapkan dengan kekayaan perusahaan.
- h. Hutang lainnya
Analisis bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan itu mempunyai hutang kepada pengurus/pemegang saham atau pihak lain dan bagaimana timbulnya hutang tersebut.
- i. Kredit *supplier*
Analisis pos ini sama dengan analisis akun hutang jangka pendek lainnya. Yang terpenting untuk dianalisis adalah pembayaran kepada supplier itu, apakah disalurkan melalui bank kreditur atau tidak.
- j. Modal sendiri
Analisis akun ini menyangkut jumlah, peranan dan perkembangannya dalam neraca.⁸

4. Analisis rasio keuangan

Analisis rasio keuangan adalah mengenai hubungan antara satu akun atau satu grup rekening dengan akun atau rekening lainnya, berkenaan dengan posisi keuangan perusahaan. Analisis ini merupakan analisis pengambilan keputusan berkenaan dengan keuangan perusahaan. Rasio-rasio dalam analisis keuangan baru mempunyai arti jika terdapat patokan atau standar yang ditetapkan sebagai ukuran penilaian. Pengelompokan rasio keuangan sangat banyak sekali karena rasio dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Dilihat dan sumbernya dari mana rasio ini dibuat, maka rasio digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

⁸ Sam A. Wallean, *Bank dan wiraswasta*, Edisi Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 116.

- a. Rasio-Rasio Neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya *current ratio*, *acid test ratio*, *current to total assets ratio*, *current liabilities to total assets ratio* dan sebagainya.
- b. Rasio-Rasio Laporan Rugi/Laba yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari daftar rugi/laba, misalnya *gross profit margin net operating margin*, *operating ratio* dan sebagainya.
- c. Rasio-rasio antar laporan yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan daftar rugi / laba, misalnya *assets turn over*, *receivables turn over*.⁹

Berbagai kategori rasio berdasarkan tujuan penganalisisan dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya, maka rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 6 (enam) kategori yaitu:

- a. Rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek bila jatuh tempo,
- b. Rasio *leverage*, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang,
- c. Rasio aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya.
- d. Rasio profitabilitas, yang mengukur aktivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dan penjualan dan investasi perusahaan.
- e. Rasio pertumbuhan, mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
- f. Rasio penilaian, mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi.¹⁰

Setiap analisis mempunyai tujuan atau kegunaan yang menentukan peredaan penekanan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Seorang analis, misalnya bankir sedang mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek untuk suatu perusahaan akan menekankan pada posisi perusahaan jangka pendek, sehingga

⁹ Bambang Riyanto, **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Cetakan Keenam, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal. 330

¹⁰ James C, Van Horne, John M Wachowicz, JR, **Fundamentals of Financial Management (Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan)**, Penerjemah Dewi Fitriyani, Buku 1 Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. 205.

mereka menekankan pada rasio likuiditas. Sebaliknya pemberi kredit jangka panjang akan lebih menekankan pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan efisien operasinya. Mereka mengetahui bahwa operasi yang tidak efisien akan mengikis nilai aktiva dan posisi sekarang yang kuat tidak menjamin bahwa dana akan tersedia untuk melunasi hutang jangka panjang.

Rumusan yang sering digunakan pada rasio keuangan ini adalah:

a. Rasio *current* likuiditas

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Total aktiva lancar}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

Perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek akan menghasilkan bilangan yang menunjukkan bahwa nilai kekayaan perusahaan yang dalam jangka pendek dapat dicairkan/dijadikan uang tunai adalah sebesar sekian kali dari jumlah hutang jangka pendek yang segera dapat ditagih. Dalam keadaan *current ratio* sebesar 200% dianggap cukup baik.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Total aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

Quick ratio atau *Acid test ratio* ini lebih likuid dari *current ratio*, karena nilai persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. *Quick ratio* sebesar 100% dianggap cukup baik.

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan berapa besarnya uang yang tersedia dan segera dapat digunakan untuk membayar hutang jangka pendek tanpa harus menunggu pencairan piutang dan persediaan barang.

$$\text{Inventory to working kapital} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Modal kerja netto}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan berapa bagian modal kerja yang ditanamkan dalam persediaan.

b. Rasio leverage

$$\text{Current Liailities to net worth} = \frac{\text{Hutang jangka pendek}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera dapat ditagih adalah sebesar sekian kali dari dana yang dimiliki perusahaan itu sendiri.

$$\text{Total Asset to Total Debt} = \frac{\text{total aktiva}}{\text{total hutang}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan beberapa bagian dan aktiva yang dibiayai oleh kreditur. Pihak kreditur lebth menyukai bahwa semakin rendah rasio ini tersebut maka makin besar kemungkinan perusahaan mampu membayar hutangnya atau makin kecil kerugian yang dihadapi perusahaan dilikuidir.

c. Rasio Aktivitas

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Harga pokok penjualan}}{\text{nilai persediaan rata - rata}}$$

Rasio ini menunjukkan beberapa kali persediaan rata-rata berputar dalam satu periode.

$$\text{Average Collection Period} = \frac{\text{piutang rata - rata} \times 360 \text{ hari}}{\text{penjualan kredit}}$$

Rasio ini menunjukkan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang.

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{penjualan netto}}{\text{jumlah aktiva}}$$

Rasio ini menunjukkan beberapa kali kemampuan dana yang tertanam dalam aktiva berputar dalam suatu periode tertentu menghasilkan pendapatan.

d. Rasio Keuntungan:

$$\text{Net Profit Margin (Sales Margin)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{penjualan netto}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan beberapa persen laba per Rupiah yang dihasilkan dan penjualan.

$$\text{Rate of Return on Investment} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{jumlah aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan dan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva menghasilkan laba bersih. Angka rasio sebesar 10% dianggap baik.

$$\text{Rate of Return on Net Worth} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{jumlah modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan dan modal sendiri untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Angka rasio sebesar 15% dianggap cukup baik.

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana.

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dari mana perusahaan memperoleh dana dan untuk apa dana tersebut digunakan dalam suatu periode tertentu. Dari sudut kepentingan bank, analisis sumber dan penggunaan dana sangat penting, karena cara demikian dapat diketahui kebijaksanaan pembelanjaan yang dijalankan perusahaan pada periode tersebut serta perubahan akun aktiva, akun hutang dan modal kerja dalam neraca akan menunjukkan bertambah atau berkurang.

D. Pengawasan Pemberian Kredit

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada para nasabahnya, bank dihadapkan pada suatu masalah yang cukup kompleks, antara lain:

1. Kepada siapa kredit itu diberikan.
2. Untuk (objek) apakah kredit itu harus diberikan.
3. Apakah calon debitur yang akan menerima kreditnya akan mampu mengembalikan hutang pokoknya ditambah bunga serta kewajiban lainnya.
4. Berapa jumlah (plafon), maksimum kredit yang layak untuk diberikan.
5. Apakah kredit yang akan diberikan cukup aman/resikonya kecil.

Selain masalah-masalah kecil yang harus dipecahkan oleh perusahaan perbankan dalam pemberian kredit, maka pengelola kredit juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat khusus yang menyangkut

kegiatan usaha calon debiturnya secara spesifik, hal ini disebabkan kelancaran pengembalian sangat berhubungan dengan kemajuan usaha debitur.

Artinya masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan spesifik berbeda secara materil antara satu nasabah dengan nasabah yang lain. Oleh karena itu, antara satu nasabah dengan nasabah lain diperlukan adanya pendekatan dan penanganan secara berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya.

Untuk dapat menjawab atau mengambil keputusan masaiyah-masalah yang akan dihadapi dalam proses pemberian kredit ini, maka diperlukan suatu analisis pemberian kredit. Analisis ini perlu dilakukan secara kritis baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif terhadap aspek mikro ekonomis dan aspek makro ekonomis yang mempengaruhi kegiatan suatu jenis usaha. Proses analisis ini dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk itu ataupun oleh sekelompok orang yang terdiri dan beragai ahli profesi untuk kemudian membentuk suatu tim agar merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi oleh bank dalam pemutusan pemberian kepada calon debiturnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan analisis kredit itu sendiri yaitu membahas aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan usaha secara kritis maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Pemilihan pendekatan yang dipakai dalam melaksanakan analisis kredit.

Dalam melaksanakan analisis kredit, ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh pihak bank, yaitu

- a. Pendekatan jaminan (*collateral approach*), yaitu kredit yang akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan yang memadai baik ditinjau dan segi nilai ekonomis ataupun dan segi juridisnya.
- b. Pendekatan karakter (*character approach*), proses pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter bisnis dan calon debiturnya.
- c. Pendekatan atas dasar kemampuan pelunasan kredit, pendekatan ini berdasarkan pada kemampuan pelunasan hutang nasabah, dan tidak berdasarkan pada karakternya ataupun feasibilitas dari proyek.
- d. Pendekatan atas dasar tingkat keterlaksanaan proyek usaha calon debitur (*feasibility approach*). Dalam pendekatan ini pihak bank menilai sampai sejauh mana proyek usaha calon debitur tersebut dapat melunasi kewajibannya dengan sumber-sumber dana yang dapat dihimpun oleh usaha yang dilakukannya.

2. Proses pengumpulan informasi

Setelah pendekatan yang akan digunakan dalam analisis kredit dapat dirumuskan, maka harus segera mengumpulkan informasi tentang si pemohon kredit. Untuk memperoleh informasi atau tentang si pemohon kredit berbagai cara dapat dilakukan yaitu:

a. *Interview* dengan pemohon kredit

Dalam *interview* ini dapatlah diperoleh secara langsung dan calon debitur informasi yang diperlukan oleh pihak bank, juga dapat mempererat hubungan antara bank dengan nasabah.

b. *Record* bank.

Setelah memperoleh informasi kredit melalui *interview* dan inspeksi usaha nasabah, maka informasi selanjutnya dapat diperoleh dan *record* bank itu sendiri. Biasanya bank telah mempunyai *record* terhadap pemohon-pemohon kredit. *Recording* paling minimal yang dimiliki bank adalah data tentang nama, pekerjaan dan kegiatan keuangan perusahaan tersebut yang tertera dan mutasi rekening giro nya. Karena itu kebanyakan bank memberikan syarat agar si pemohon kredit harus memegang giro pada bank tersebut minimal selama enam bulan.

BAB III

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah yang semula bernama Algemene Volkscrediet Bank (AVB) dan Syoomin Ginko. Sementara itu pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Jakarta mendirikan kembali kantor besar Algemene Volkscrediet Bank.

Pada tahun 1954 setelah Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta diduduki oleh Belanda, maka kantor Bank Rakyat dihapuskan oleh NICA dan Direksi Bank Indonesia dipenjarakan oleh Belanda karena tidak mau bekerja sama dengan Algemene Volkscrediet Bank. Saat itu kegiatan Bank Rakyat Indonesia aktif kembali, akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan di daerah lainnya nama Algemene Volkscrediet Bank (AVB) diganti menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat atau disingkat dengan nama BARRIS.

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh pula terhadap perkembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan surat keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1959. Direksi

Bank Rakyat Indonesia negara bagian Republik Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRIS.

Surat keputusan tersebut mendapat protes dari para Federalis sebab secara nyata kantor besar BARRIS belum ada, sehingga Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat meralatnya dengan menamakan direksi baru itu dengan nama Direksi AVB Bank Rakyat Indonesia. Selain itu peraturan No. 25 tahun 1951, tanggal 20 April 1951 menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Menengah.

Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 41 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober lembaran Negara No. 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang disingkat dengan BKTN.

Namun sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Panpers No. 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 disatukan dengan Bank Indonesia. Sebagai satu langkah kebijaksanaan pemerintah menunjuk pembentukan Bank Tunggal. BKTN diintegrasikan pula ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan berdasarkan Panpres No. 9 tahun 1965 dan surat Menteri Bank Sentral No. 42 tahun 1965.

Ketika Panpres tersebut berjalan satu bulan, keluarlah Panpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara

Indonesia dan Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan, diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II.

Selanjutnya Bank Negara Indonesia Unit II dalam sehari-harinya bekerja dengan nama Bank Indonesia Unit II bidang Rural sedangkan Ex Netherlandsehe Handel Mij bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang ekspor-impor. Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral dikembalikan dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural / Eksim dijadikan Bank-bank milik Negara dengan nama:

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia bidang Rural dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1968.
2. Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1968.

Pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No. S.57-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 Direksi Bank Rakyat Indonesia menetapkan bahwa, hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1985.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Iskandar Muda didirikan pada tahun 1989 yang merupakan kantor cabang yang ke-15 di Sumatera Utara. Saat

ini kantor Cabang Iskandar Muda membawahi 24 BRI Unit ditambah 3 kantor cabang pembantu. Jumlah ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi pasar dan perekonomian di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

2. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan harus mempunyai struktur organisasi, baik perusahaan negara maupun swasta. Karena tanpa adanya struktur organisasi tujuan dan perusahaan tidak akan tercapai.

Organisasi adalah merupakan suatu sistem dan aktivitas yang dikoordinir dalam melaksanakan dan menggerakkan sejumlah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan ialah adanya hubungan timbal balik antara pimpinan dengan bawahan, sehingga tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan. Apabila suatu organisasi kurang baik, hal ini akan dapat mengakibatkan kesemerautan dalam pekerjaan masing-masing.

Oleh karena itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan telah mempunyai organisasi yang efektif tentang struktur organisasi yang standar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melayani para nasabah dan masyarakat yang ingin mempergunakan jasa-jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan. Struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan dapat dilihat dari bagan atau gambar di halaman berikut ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

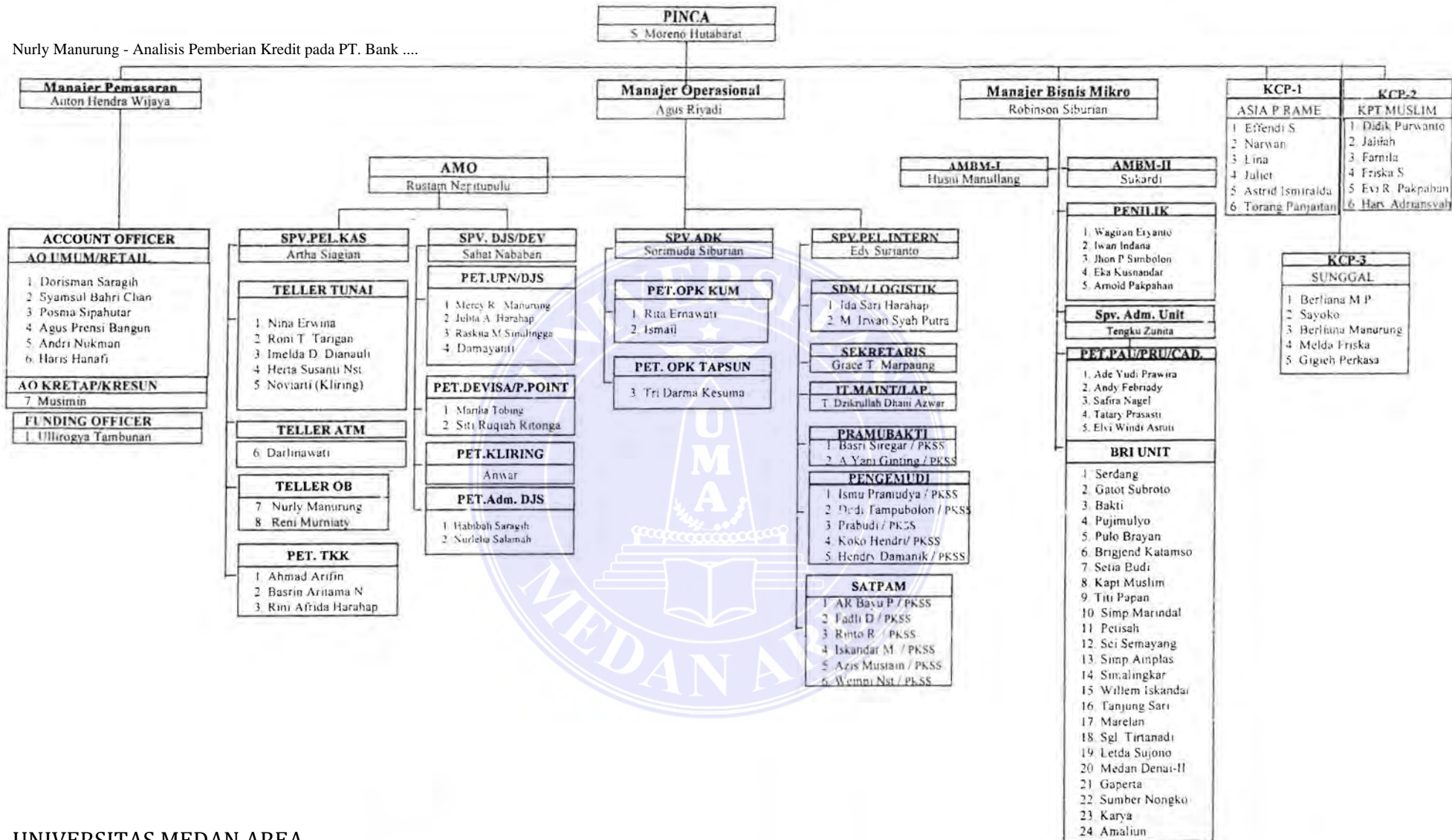
Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)29/2/24



Dalam pendelegasian tugas dan wewenang, telah diatur sedemikian rupa sehingga diketahui tugas dan fungsi dari masing-masing seksi/bagian dalam organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Iskandar Muda Medan. Adapun uraian tugas, fungsi dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan cabang

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola seluruh kegiatan kantor cabang BRI dan BRI unit di wilayahnya.
- b. Bekerja dengan pegawai kantor Cabang untuk mengembangkan tujuan yang ingin dicapai oleh kantor cabang BRI.
- c. Mengelola rencana pengembangan bisnis, memonitor hasil-hasilnya dan memecahkan masalah yang timbul di kantor cabang BRI.
- d. Mewakili direksi mengenai hubungan kedinasan dalam rangka kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah setempat atau badan atau lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta menurut norma-norma hubungan kedinasan yang sehat dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Manajer operasional (OP)

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Wakil Pimpinan Cabang BRI unit bertanggung jawab untuk seluruh bidang, khususnya bidang operasional.

3. Account officer

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola, merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi aktivitas bisnis kantor cabang (kredit, pengerahan dana dan produk atau jasa lainnya).
- b. Mencari dan menetapkan pasar sasaran, toleransi dan batasan resiko untuk kantor cabang sesuai dengan petunjuk teknis atau standard operatinal procedure yang ada.

4. Asisten manajer operasional (AMO)

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengkoordinasikan proses pelayanan nasabah di kantor cabang secara etèktif dan efesiensi.
- b. Mengawasi seluruh proses kegiatan operasional perkreditan dan mempersiapkan pembayaran atau realisasi kredit ataupun pembayaran gaji pegawai kantor cabang.

5. Koordinator administrasi kredit

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjamin berjalannya kebijaksanaan dan prosedur perkreditan di Kantor Cabang.
- b. Mengadakan konsultasi dengan account officier untuk kredit yang baru, perubahan kredit dan masalah lain bila diperlukan.
- c. Mengelola kelengkapan dari pekerjaan *financial analysis*.

6. Koordinator akuntansi dan laporan

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan proses akuntansi di kantor cabang untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional sehari-hari.
- b. Mengelola dan mengkoordinasikan persiapan pembuatan anggaran di kantor cabang dan menyajikan laporan keuangan dari kantor cabang.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahannya dalam membuat anggaran tahunan dan revisi anggaran berdasarkan petunjuk dari kantor wilayah atau kantor pusat ataupun pimpinan cabang.

7. Kasi devisa

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjamin kelancaran pelayanan transaksi-transaksi ekspor dan impor di kantor cabang.
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan Invesible dan jasa Bank.
- c. Membuat rencana kerja anggaran.

8. Kasi rutang (rumah tangga)

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pelayanan intern di kantor cabang dan pengelolaan kebutuhan logistik termasuk kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Unit.
- b. Menjamin semua surat yang masuk dan keluar diproses dengan tepat waktu.
- c. Menjamin penyediaan kebutuhan operasional di kantor cabang dan Bank Rakyat Indonesia Unit.
- d. Menangani harta dan asset perolehan, disposisi dan penyimpanan arsip kepegawaian BRI/BRI Unit dengan kebijaksanaan Kantor Bank Rakyat Indonesia Pusat.
- e. Menjamin dan memelihara kas kecil (*petty cash*).
- f. Membuat permohonan pengambilan kas dari brankas pada pagi hari dan selama hari berjalan.

- g. Menyiapkan kelebihan kas selama hari berjalan dan mengumpulkan penerimaan kas selama akhir hari.
 - h. Memberikan persetujuan surat-surat penolakan pada nasabah.
 - i. Memeriksa bahwa seluruh kas teller telah dihitung pada akhir hari.
 - j. Secara efektif memonitor pelayanan terhadap nasabah.
9. Unit desa officer (UDO)
- Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugasnya mengelola, merencanakan, mengorganisir dan mengawasi aktivitas Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit (termasuk kredit, penyerahan dana dan produk/jasa bank lainnya), serta kualitas portofolio kredit untuk memaksimalkan pendapatan Bank Rakyat Indonesia Unit.
 - b. Membenarkan perhatian atas hasil-hasil audit, membina secara aktif dan profesional serta hubungan sosial dengan nasabah dan instansi-instansi pemerintah.

10. Kepala BRI Unit

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola seluruh aktivitas Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit di wilayahnya, bekerja dengan pegawai Bank. Rakyat Indonesia Unit untuk mengembangkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit.

- b. Mengelola perencanaan pengembangan bisnis unit, memonitor dan memecahkan masalah yang timbul di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit.
- c. Mewakili direksi Bank Rakyat Indonesia dalam urusan nasabah dan Pemerintah setempat.

Pada Cabang terdiri dan tiga fungsi utama, yaitu:

- Fungsi Marketing

Dilakukan oleh beberapa orang AO (*Account Officer*), perkembangan dana dan kredit di Bank Rakyat Indonesia dari pihak ketiga.

- Fungsi Operasional

Dikepalai oleh seorang *Operation Manager*, dalam operasinya terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Fungsi Rumah Tangga

- a. Mengurus kesekretariatan
- b. Logistik
- c. Personalia
- d. Kehumasan

2. Fungsi Akuntansi dan Laporan

Bertanggung jawab pada perbukuan dan penyusunan laporan.

3. Fungsi Administrasi Kredit

Bertanggung jawab terhadap administrasi tersebut yang menyangkut aspek ilegalnya saja.

4. Fungsi Operasional Bank

- a. Unit Pelayanan Nasabah
- b. Unit Pelayanan Kas
- c. Devisa
- d. Transfer

- Fungsi unit desa

Fungsi unit desa inilah yang bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan seluruh Bank Rakyat Indonesia yang disebut Unit Desa Officer, di bawahnya ada Unit Bussines Manager (LJBM) dan BRI sendiri harus ada kepala unit yang memantau setiap perkembangan BRI setiap-tiap unitnya.

B. Jenis Kredit yang Diberikan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dapat dibagi dalam dua jenis yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi, sedangkan sektor ekonomi yang dibiayai terdiri dari sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa lainnya dan golongan berpenghasilan tetap.

1. Kredit modal kerja (Eksplorasi)

Kupedes modal kerja diberikan kepada pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi

kebutuhan modal kerja usahanya atau untuk membiayai keperluan konsumtif maupun non konsumtif (produktif).

Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan kredit modal kerja antara lain:

- a. Sektor pertanian yaitu untuk membiayai semua kegiatan pertanian dan kegiatan lainnya yang terkait dan menunjang pada hasil usaha bercocok tanam seperti pengecer pupuk/obat-obatan, pengusaha mikro, yang mengumpulkan segala hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan memasarkan kembali dengan atau tanpa proses lebih lanjut.
- b. Sektor perindustrian yaitu untuk pembiayaan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Yang dimaksud bahan mentah adalah bahan mentah yang tidak berasal dari hasil pertanian.
- c. Sektor perdagangan yaitu untuk pembiayaan pembelian, penjualan dan pemasaran barang dagangan misalnya perdagangan sembako (9 bahan pokok), material bangunan, batik atau kain, dan lain-lain. Dalam hal ini, tidak termasuk pembelian, penjualan dan pemasaran hasil langsung hasil pertanian.
- d. Sektor jasa yaitu untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum. Misalnya usaha bengkel, salon, penjahit, transportasi, dan lain-lain.
- e. Sektor golongan berpenghasilan tetap (GBT) yaitu untuk pembiayaan konsumtif dan produktif yang pengembaliannya didasarkan pada

pendapatan (gaji) nasabah. Pembiayaan tersebut semata-mata hanya merupakan biaya dan tidak menghasilkan sesuatu yang berbentuk fisik. Misalnya biaya pesta perkawinan, khitanan, rumah sakit/pengobatan.

2. Kredit investasi

Kredit ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Sedangkan bagi golongan berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain-lain yang bersifat produktif.

Adapun sektor-sektor ekonomi yang dibiayai sebagai berikut:

- a. Sektor pertanian, yaitu untuk membiayai pembelian alat-alat pertanian seperti bajak, traktor, alat perontok padi, alat sortasi, mesin parut kelapa, pembuatan gudang, rantai jemur, pembelian bibit tanaman keras, atau untuk pembelian bibit ayam petelor, sapi perah dan sapi kerja, dan lain-lain.
- b. Sektor perindustrian, yaitu untuk pembiayaan pengadaan alat-alat produksi seperti mesin-mesin, wadah tungku, dan lain-lain, pembangunan atau perbaikan bangunan pabrik, tempat usaha, tempat jemuran dan sebagainya asal tujuannya tidak untuk mengolah hasil langsung pertanian.
- c. Sektor perdagangan, yaitu untuk pembiayaan pembelian alat-alat berjualan, perbaikan, perluasan tempat berjualan atau pembangunan tempat berjualan, pembangunan/perluasan/perbaikan gudang yang tidak bertujuan untuk

memperdagangkan/menempatkan hasil-hasil langsung pertanian sebagai barang/benda yang dominan.

- d. Sektor jasa, yaitu untuk pembiayaan pembelian alat-alat perbengkelan mesin jahit, salon, pembelian kendaraan, atau perbaikan bangunan bengkel atau salon.
- e. Sektor golongan berpenghasilan tetap yaitu yang dipergunakan untuk pembiayaan investasi yang pengembaliannya didasarkan dari pendapatan/gaji debitur.

Dengan cara pembagian sektor ekonomi seperti di atas, BRI berharap sektor pertanian tidak ketinggalan dibanding dengan sektor ekonomi lainnya. Hal ini sesuai dengan komitmen BRI Unit untuk mengembangkan ekonomi pedesaan sebagai pelaksanaan misi Inpres No. 4 tahun 1973 yang juga merupakan landasan hukum berdirinya BRI Unit Desa.

Adapun sasaran pemberian kredit pada BRI Unit Iskandara Muda yang dapat dibagi ke beberapa sektor ekonomi seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha

Yaitu semua pengusaha yang bergerak diberbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah kerja BRI Unit seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan

dan jasa lainnya, yang usahannya benar-benar layak untuk diberikan kredit.

Persyaratan untuk calon nasabah pengusaha adalah:

- Fotokopi KTP (kartu tanda Penduduk) atau surat keterangan penduduk yang dibuat kepala desa, kredit diberikan bagi penduduk yang berdomisili dalam wilayah kerja BRI Unit setempat.
- Pas photo yang berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- Mempunyai usaha yang layak dan mempunyai karakter yang baik untuk dibiayai dengan kredit dengan melampirkan surat izin usaha dari kepala desa/lurah.
- Tidak sedang menikmati kredit lainnya di kantor cabang BRI atau di BRI Unit lainnya.
- Tanda bukti pemilikan agunan.
- Tanda pelunasan PBB pada tahun terakhir.
- Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

b. Golongan Berpenghasilan Tetap

1. Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

No.6 tahun 1974 Bab I pasal 1 adalah:

- Pegawai Negeri Sipil
- Anggota Tentara nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian
- Pegawai Badan Usaha Milik Negara
- Pegawai Perusahaan Daerah.

2. Pensiunan dari golongan masyarakat berpenghasilan tetap
3. Pegawai tetap dari perusahaan swasta

C. Analisis Pemberian Kredit

Syarat-syarat pemberian kredit terbagi dalam beberapa tahap antara lain:

1. Pelayanan permohonan pinjaman

Calon nasabah meminta informasi dan penjelasan kepada petugas administrasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Pengajuan permohonan pinjaman

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, baik untuk kredit baru, perpanjangan waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan syarat kredit. Dalam hal ini calon debitur menerangkan tentang:

- Alamat termasuk wilayah kerja,
- Sektor usaha,
- Besarnya fasilitas kredit yang diminta,
- Jangka waktu pengembalian pinjaman,
- Persediaan modal sendiri, serta
- Riwayat perkreditannya pada bank lain.

Selain itu dilengkapi juga dengan syarat-syarat: surat agunan, surat izin usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan lain-lain yang dianggap perlu.

Dan sekaligus petugas bank mencatatnya kedalam register permohonan pinjaman (model 35), diberi nomor induk peminjaman (NIP) kemudian

diteruskan kepada pejabat yang telah ditentukan untuk diminta disposisi agar dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas lapangan yang disebut dengan istilah Account Officer.

3. Pemeriksaan dan penilaian agunan

Dalam hal ini diadakan analisis dan evaluasi secara tertulis yang mencakup:

Penilaian yang seksama terhadap watak calon debitur, kemampuan usahanya, modal, agunan, kondisi/prospek usaha calon debitur dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang ditilik pada hasil usahapenghasilan dan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek juridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi pihak bank dan resiko yang mungkin timbul. Penilaian agunan didasarkan atas harga pasar (harga patokan dari Pemda setempat). Penafsiran barang agunan dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Penilaian kualitatif, adalah penilaian barang jaminan yang dipasarkan atas kuat atau lemahnya barang tersebut dijadikan jaminan dan ikatan apa yang dapat dikenakan padanya.
- b. Penilaian kuantitatif, adalah penilaian barang jaminan yang didasarkan atas harga apabila barang tersebut dijual, untuk penilinan tersebut digunakan taksiran harga lelang sita (TLS).

4. Analisis dan Aplikasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, serta informasi lainnya maka pejabat kredit harus membuat kesimpulan dari hasil analisisnya atas permintaan kredit yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk

dipakai sebagai dasar pembuatan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit. Jika permohonan kredit direkomendasikan untuk disetujui, pejabat kredit wajib menyusun struktur dan tipe kredit, syarat dan ketentuan kreditnya. Jika permohonan kredit ditolak maka pejabat kredit harus memberikan alasan-alasan penolakan tersebut.

5. Putusan atas aplikasi kredit

Rekomendasi pemberian putusan kredit yang merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan disampaikan oleh pimpinan secara tertulis kepada komite kredit yang berwenang untuk memutuskan sesuai dengan jumlah kredit tersebut. Adapun tahap pemberian putusan kepada calon debitur adalah:

a. Pemberitahuan pemberian kredit

Petugas bank memberitahu kepada nasabah bahwa kreditnya telah diputuskan, baik secara langsung atau melalui surat.

b. Pengisian formulir-formulir realisasi kredit

c. Pembuatan dan penandatanganan akad kredit

- 1) Pihak pertama: pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan
- 2) Pihak kedua Nasabah (debitur) yang bersangkutan
- 3) Pihak ketiga : pejabat yang berwenang, melegalisir, misalnya notaris, pengadilan negeri, camat setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.

d. Pengikatan agunan.

Pengikatan agunan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan, lazimnya dilakukan sebelum kredit direalisasikan atau sesudah nyata persetujuan/perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Biaya-biaya administrasi kredit dibebankan kepada nasabah dan dipungut pada waktu realisasi kredit.

e. Realisasi kredit

Realisasi kredit dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan dilengkapi.

D. Evaluasi Laporan Keuangan

Dalam mengevaluasi suatu usulan kredit harus melakukan penilaian disamping mencakup penilaian 5C dan menyajikan analisis dan evaluasi dan sisi aspek keuangan dan pemohon kredit.

Analisis dan penilaian aspek keuangan pemohon kredit dilakukan melalui laporan keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang diserahkan oleh pemohon.

Laporan keuangan yang diserahkan oleh pemohon kredit itu sedapatnya telah diaudit oleh akuntan publik. Namun, bila tidak diaudit maka laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Analisis dan penilaian aspek keuangan yang dilakukan adalah meliputi:

1. Analisis sumber dan penggunaan dana

Analisis sumber dan penggunaan dana ini merupakan analisis historis yang dimaksudkan untuk mengetahui darimana sumber dana diperoleh perusahaan debitur dalam suatu periode tertentu dan untuk apa dana tersebut dipergunakan dalam periode yang sama.

Analisis ini sangat penting bagi bank, untuk:

- a. Mengetahui kebijaksanaan pembiayaan yang dianut perusahaan debitur.
- b. Mengetahui setiap perubahan pos-pos aktiva dalam neraca sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya dapat diteliti sebab-sebab perubahan tersebut. Bagi debitur lama, hal ini penting untuk mengetahui adakah peningkatan pada aktiva yang dipakai bank.
- c. Mengetahui setiap perusahaan pada pos-pos hutang dan modal sendiri, selanjutnya dapat diteliti sebab-sebab perubahan tersebut. Untuk menganalisis dan penggunaan dana, diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ikhtisar mengenai modal kerja,
 - 2) Ikhtisar mengenai sumber dan penggunaan dana,
 - 3) Ikhtisar mengenai penerimaan dan penggunaan kas.

2. Analisis rasio

Penilaian dan analisis terhadap aspek keuangan debitur atau calon debitur lazim menggunakan analisis rasio yang didasarkan atas angka-angka pada Neraca maupun perhitungan Laba/rugi. Rasio-rasio yang dianalisis

adalah rasio yang berhubungan dengan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

- a. Rasio yang berhubungan dengan likuiditas meliputi: *current ratio, quick ratio, cash ratio, inventory to net working capital ratio.*
- b. Rasio yang berhubungan dengan solvabilitas meliputi: *debt to net worth ratio (Debt to equity ratio), current liabilities to net worth ratio, total assets to total debt ratio, debt service coverage, fixed assets to net worth.*
- c. Ratio yang berhubungan dengan rentabilitas meliputi: *profit margin, return on invesment, return on equity.*
- d. Ratio yang berhubungan dengan aktivitas meliputi: *Inventory turn over, average collection period, cash velocity, cash to cash period.*

Adapun rumus-rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$* \text{ Inventory turn over (average day's)} = \frac{\text{persediaan rata - rata}}{\text{harga pokok penjualan}} \times 360 \text{ hari}$$

$$* \text{ Average collection period} = \frac{\text{piutang rata - rata}}{\text{penjualan bersih}} \times 360 \text{ hari}$$

$$* \text{ Cash velocity} = \frac{\text{kas + bank}}{\text{penjualan bersih}} \times 360 \text{ hari}$$

* Cash to cash period (activity ratio):

$$\text{i. } \textit{Inventory turn over} = a \text{ hari}$$

$$\text{ii. } \textit{Average collection period} = b \text{ hari}$$

$$\text{iii. } \textit{Cash velocity} = c \text{ hari}$$

$$\textit{Cash to cash period} = \underline{a+b+c} \text{ hari}$$

3. Analisis kebutuhan modal kerja

Untuk menghitung kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Untuk kredit yang sifatnya berulang (berbentuk pinjaman rekening koran), seperti: kredit produksi, ekspor dan perdagangan, dengan mempergunakan pendekatan dan hasil analisis rasio pada neraca dan daftar laba/rugi, yaitu: *cash velocity*, *average collection period*, *inventory turn over* yang merupakan bagian dari pada *working capital turnover (cash to cash period)*, apabila dihadapkan dengan data mengenai penjualan rata-rata per bulan dapat dihitung kebutuhan modal kerja.

1) *Working capital turn over (cash to cash period)*:

- i. *Inventory turn over* : a hari
- ii. *Average collection period* : b hari
- iii. *Cash velocity* : c hari
- iv. *Cash to cash period* : a + b + c hari

2) Moda kerja yang tersedia:

Modal kerja netto	=
Hutang jangka pendek pihak ke III	=
Kelonggaran tarik kredit bank	= <u>.....</u>
Jumlah	= <u>.....</u>

3) Penjualan rata-rata perbulan	=
Dikurangi:	
Profit margin	= Rp.....
Penyusutan	Rp.....(+)
	<u>= Rp</u>
Total pengeluaran	<u>= Rp.....</u>

4) Kebutuhan modal kerja:	
Modal kerja tersedia	=Rp.....
$\frac{\text{Cash to cash period}}{30} \times \text{total pengeluaran}$	<u>=Rp.....</u>
Kekurangan / kelebihan modal kerja	=Rp.....

b. Untuk kredit yang bersifat transaksional ataupun *plopend* (berdasarkan angsuran) seperti kredit musiman, kredit investasi, kredit industri kontruksi, dan kredit lainnya yang sejenisnya, umumnya mempergunakan pendekatan “*cash flow projection*” harus disertakan penjelasan berupa dasar asumsi yang dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti kapasitas produksi yang hendak dicapai, syarat pembayaran atas hasil penjualan dan lain-lain. Pendekatan ini di samping menghitung besarnya kebutuhan modal kerja, juga mengukur jangka waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

Berikut ini disajikan ilustrasi penilaian aspek keuangan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan, disajikan dalam bentuk rasio keuangan (data fiktif, diolah penulis) sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas

$$\begin{aligned} \text{Current ratio} &= \frac{\text{Total aktiva lancar}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 485.400}{\text{Rp } 238.000} \times 100\% \\ &= 204\% \end{aligned}$$

Situasi perekonomian dalam keadaan normal, current ratio sebesar 200% dianggap cukup baik.

$$\begin{aligned} \text{Quick Ratio} &= \frac{\text{Total aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 485.400 - \text{Rp } 206.700}{\text{Rp } 238.000} \times 100\% \\ &= 117\% \end{aligned}$$

Quik ratio sebesar 100% dianggap sudah cukup baik.

$$\begin{aligned} \text{Cash ratio} &= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 5000}{\text{Rp } 238.000} \times 100\% = 2,10\% \end{aligned}$$

Ratio ini menunjukkan berapa besarnya uang yang tersedia yang segera dapat dipergunakan untuk membayar hutang jangka pendek tanpa harus menunggu pencairan piutang dan persediaan kantor.

$$\begin{aligned} \text{Inventory to working kapital} &= \frac{\text{Persediaan}}{\text{Modal kerja netto}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 206.700}{\text{Rp } 485.400 - \text{Rp } 238.000} \times 100\% \\ &= 83.54\% \end{aligned}$$

rasio ini menunjukkan berapa bagian modal kerja yang ditanamkan dalam persediaan.

2) Rasio solvabilitas

$$\begin{aligned} \text{Debt to equity ratio} &= \frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 604.600}{\text{Rp } 16.600} \times 100\% \\ &= 117\% \end{aligned}$$

Ratio ini mengukur perbandingan antara modal luar dengan dengan modal sendiri. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa modal luar akan menanggung resiko lebih besar dan pada modal sendiri.

$$\text{Current Liaibilities to net worth} = \frac{\text{Hutang jangka pendek}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp238.000}{Rp516.600}$$

$$= 0,461 \text{ kali}$$

rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera dapat ditagih adalah sebesar sekian kali dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Total Asset to Total Debt} = \frac{\text{total aktiva}}{\text{total hutang}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp1.121.200}{Rp604.600} \times 100\%$$

$$= 185\%$$

Rasio ini menunjukkan berapa bagian aktiva yang dimiliki yang dibiayai oleh kreditor. Pihak bank lebih menyukai rasio ini serendah mungkin karena rasio yang rendah menunjukkan kemungkinan perusahaan tersebut mampu membayar seluruh hutangnya atau resiko kerugian bank akan kecil apabila perusahaan tersebut dilikuidir.

3) Rasio rentabilitas

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Keuntungan setelah pajak}}{\text{penjualan netto}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp147.000}{Rp1.302.000} \times 100\%$$

$$= 11,29\%$$

rasio ini menunjukkan beberapa persen laba per Rupiah yang dihasilkan dari penjualan.

$$\begin{aligned} \text{Return on investment} &= \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{jumlah aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{Rp147.000}{Rp1.121.000} \times 100\% \\ &= 13,11\% \end{aligned}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva menghasilkan laba bersih. Angka rasio sebesar 10 % dianggap baik.

$$\begin{aligned} \text{Return on equity} &= \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{jumlah modal sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{Rp147.000}{Rp516.600} \times 100\% \\ &= 28,45\% \end{aligned}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Angka rasio sebesar 15% dianggap cukup baik.

4) Rasio aktivitas

Inventory turn over (average days)

$$= \frac{\text{persediaan rata - rata}}{\text{harga pokok penjualan}} \times 360 \text{ hari}$$

$$= \frac{(\text{Rp } 81.200 + \text{Rp } 148.500) : 2}{\text{Rp } 976.500} \times 360 \text{ hari}$$

$$= 41,43 \text{ hari}$$

Rasio ini menunjukkan beberapa hari persediaan barang berputar dalam satu periode.

$$\text{Average collection period} = \frac{\text{piutang rata - rata}}{\text{penjualan bersih}} \times 360 \text{ hari}$$

$$= \frac{(\text{Rp } 253.820 + \text{Rp } 273.7000) : 2}{\text{Rp } 1.302.000} \times 360 \text{ hari}$$

$$= 72,92 \text{ hari}$$

Rasio ini menunjukkan rata-rata diperlukan di dalam pengumpulan piutang. Makin pendek rasio ini semakin baik.

$$\text{Cash velocity} = \frac{\text{kas + bank}}{\text{penjualan bersih}} \times 360 \text{ hari}$$

$$= \frac{\text{Rp } 5.000}{\text{Rp } 1.302.000} \times 360 \text{ hari}$$

$$= 1,38 \text{ hari}$$

Rasio ini menunjukan beberapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan uang guna menghasilkan penjualan bersih.

Cash to cash period (activity ratio) :

i. *Inventory turn over* : 42.34 hari

ii. *Average collection period* : 72.92 hari

iii. *Cash velocity* : 1.38 hari

iv. *Cash tocash period* : 117 hari

Rasio ini menunjukkan beberapa hari perputaran modal kerja yang diperlukan.

5) Perhitungan analisis kebutuhan modal kerja sebagai berikut:

1) Perputaran modal kerja

i. *Inventory turn over* : 42.34 hari

ii. *Average collection period* : 72.92 hari

iii. *Cash velocity* : 1.38 hari

iv. *Cash tocash period* : 117 hari

2) Moda kerja yang tersedia:

i. Modal kerja neto =Rp 247.400

ii. Hutang jangka pendek pihak ke III =

iii. Kelonggaran tanf kredit bank =

Jumlah = Rp 247.400

3) Penjualan rata-rata perbulan =Rp130.200

Dikurangi:

Profit margin = Rp 14.700

Penyusutan = Rp 55.400 (+)

= Rp 70.100

Total pengeluaran = Rp 60.100

4) Kebutuhan modal kerja:

Modal kerja yang tersedia =Rp247.400

$$\frac{117 \text{ hari}}{30} \times \text{Rp } 60.100 = \underline{\underline{\text{Rp } 234.390}}$$

Kelebihan modal kerja =Rp 13.010

Keterangan:

1. Penjualan tahun 2007 diasumsikan naik sebesar 20%

Penjualan netto tahun 2007 = Rp 1.562.400

Penjualan rata-rata perbulan = Rp 130.200

2. Profit margin = $\frac{\text{Pendapatan sesudah pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp } 147.000}{\text{Rp } 1.302.000} \times 100\%$$

$$= 11,29\%$$

Profit margin tahun 2007 = $11,29\% \times \text{Rp } 130.200 =$
Rp14.700

E. Pengawasan Pemberian Kredit

Dalam rangka mencapai tujuan *safety* dalam proses pemberian kreditnya, petugas bagian kredit PT BRI (Persero) Cabang Iskandar Muda Medan mengambil langkah-langkah untuk mengkategorikan kredit berdasarkan kelancaran pelunasan. Hal ini dilaksanakan demi kelancaran tugas-tugas

pengamanan kredit atau fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada nasabah, sehingga sikap dan cara-cara menghadapi nasabah dapat disesuaikan sedemikian rupa dengan kelancaran kreditnya.

Sesuai dengan maksud pengamanan, maka *collectibility* kredit kredit disusun kriteria-kriterianya dengan penggolongan masing-masing kriteria dalam kelompok tersendiri.

- a. *Collectibility* A (lancar) yaitu kredit kewajiban secara lancar dapat dipenuhi oleh nasabah dan tidak pernah terjadi penunggakan.
- b. *Collectibility* B (Tunggakan Hitam), yaitu kredit yang pembayarannya naik dan angsuran atau lebih tidak dibayar tepat pada saat bulan dimana angsuran ditetapkan /diwajibkan, tetapi melewati batas waktu pelunasan (jatuh tempo).
- c. *Collectibility* C (tunggakan Merah), yaitu kredit yang belum / tidak dilunasi sesudah waktu pelunasan, tetapi belum melebihi 3 bulan sesudah pelunasannya (jatuh tempo).
- d. *Collectibility* D (ragu-ragu dan macet), yaitu kredit yang sudah lebih dari 3 bulan sejak jatuh tempo lunas, masih belum juga. Penagihannya dilakukan secara damai, dengan memberikan kesempatan melonggarkan kepada nasabah untuk menjual sendiri barang jaminannya guna melunasi kreditnya atau dari sumber-sumber lain.

Maksud dan penggolongan kredit berdasarkan *colectibility* adalah untuk memudahkan pihak bank melakukan pengawasan fasitas kredit yang telah dikeluarkannya sehingga setiap keadaan kredit dapat diikuti dengan baik.

Untuk mengetahui keadaan nasabah secara aktif, PT BRI (Persero) Cabang Iskandar Muda Medan memerlukan data nasabah yang informasinya dapat diperoleh dan nasabah yang disampaikan kepada bank. Data tersebut memuat semua tentang diri nasabah dan jenis kegiatan usahanya. Jenis data tersebut berisikan:

1. Nama dan alamat perusahaan,
2. Jenis dan kegiatan perusahaan,
3. Maksimum/ limit fasilitas kredit,
4. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit,
5. Bentuk pinjaman,
6. Tujuan penggunaan kredit secara jelas,
7. Suku bunga,
8. Bea materai kredit yang harus dibayar.
9. Sanksi-sanksi seperti:
 - a. Gugur hak intensif pembayaran waktu (PTW).
 - b. Tidak akan diberikan pinjaman selanjutnya.
 - c. Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.
10. Agunan dengan menyebutkan jumlah, jenis, nilai dan cara pengikatannya.
11. Pembayaran bunga dan angsuran kredit,
12. *Collectibility* yaitu dengan menyebutkan perkembangan kelancaran kredit dari bulan ke bulan. Misalnya pada bulan Januari tergolong lancar, tetapi pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bulan April karena penunggakan angsuran, digolongkan pada *collectibility B* akan tetapi pada bulan-bulan Mei pokok ditambah bunga yang tertunggak dibayar sekaligus pada bulan tersebut kembali ke golongan lancar.

13. Asuransi, dengan menyebutkan maskapai mana, nomor polis dan jumlah penutupannya.
14. Agunan, dengan menyebutkan jumlahnya, jenis, nilai dan cara-cara pengikatannya.

Dalam rangka pengamanan kredit, *follow up* dan pembinaan kredit sangat penting. Nasabah perlu di bina agar usahanya maju dan berkembang sehingga akan dapat memenuhi kewajibannya secara baik. Ini berarti memperlicin jalan pencapaian rentabilitas bank dan amannya kredit.

PT BRI (Persero) Cabang Iskandar Muda Medan dalam rangka mengadakan *follow up* dan pembinaan nasabah menerapkan langkah-langkah seperti:

1. Mengawasi penarikan kredit dan penggunaan kredit.
2. Mengadakan pembinaan terhadap debitur,
3. Mengasuransikan jaminan-jaminan kredit,
4. Mengawasi pelunasan kredit serta penyesaiannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pengajuan permohonan kredit yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
 - b. Mengisi daftar isian yang disediakan oleh bank secara benar dan lengkap.
 - c. Melampirkan berkas-berkas perizinan yang dimiliki, neraca dan daftar laba/rugi perusahaan.
 - d. Melampirkan data rencana dan realisasi pembelian, produksi penjualan.
 - e. Melampirkan data aktivitas rekening koran (giro).
 - f. Melampirkan data jaminan yang akan diserahkan.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan adalah meliputi:
 - a. Evaluasi sumber dan penggunaan dana.
 - b. Evaluasi kebutuhan modal kerja
 - c. Analisis rasio

3. Pengawasan kredit yang dilakukan PT BRI (Persero) Tbk Cabang Iskandar

Muda Medan adalah:

- a. Pengawasan secara administrasi
- b. Pengawasan fisik (*checking on the spot*)

Kebaikan-kebaikan sistem pemberian kredit yang ditemukan pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Iskandar Muda Medan:

1. Persyaratan dan prosedur yang ditetapkan mudah dipenuhi.
2. Bunga pinjaman yang relatif kecil dibandingkan dengan bank swasta.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dengan jaminan yang sesuai dengan besarnya kredit yang dipinjam.
2. Untuk mengantisipasi nilai jaminan yang rendah, maka jaminan dibuat di depan notaris.
3. Hendaknya dari pihak bank mengontrol atau terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui laporan produksi debitur, sehingga dapat dicari jalan keluar atas keterlambatan kewajiban debitur dalam melunasi kreditnya.
4. Hendaknya pelaksanaan pemberi kredit dapat menganalisis aspek keuangan secara tepat dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Wijaya Tunggal, **Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Bambang Riyanto, **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Cetakan Keenam, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Djarwanto, PS, **Pokok Pokok Analisa Laporan Keuangan**, Cetakan Kelima, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Indra Darmawan, **Pengantar Uang dan Perbankan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- James C, Van Horne, John M Wachowicz, JR, **Fundamentals of Financial Management (Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan)**, Penerjemah Dewi Fitriasari, Buku 1 Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Koentjaraningrat, **Metode Riset**, Edisi Satu, Cetakan Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2001.
- Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Edisi Kedua, Jakarta, 2004.
- Muhammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Edisi Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2001.
- Sam A. Wallean, **Bank dan wiraswasta**, Edisi Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, 2003.
- S. Nasution, dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Skripsi, Tesis, Disertasi dan Makalah**, Edisi Tujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 1995